

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai suku dan budaya yang beragam, dari Sabang sampai Marauke. Menurut sensus dari Badan Pusat Statistik Tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa.¹ Indonesia memiliki banyak suku dengan tata cara perkawinan adat dan waris yang berbeda-beda. Sistem adat *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral* berbeda di dalam tata cara perkawinan dan waris.

Tata cara perkawinan dan waris dengan berbagai sistem hukum adat di Indonesia sangat penting untuk dilakukan dan dilestarikan, agar kelak suku dan budaya yang berbagai macam di Indonesia tidak akan punah seiring berkembangnya zaman. Hal ini dikarenakan suku dan budaya merupakan identitas bangsa. Tanpa identitas bangsa tidak akan dianggap oleh negara lain. Tata cara perkawinan dan waris juga sangat penting sebagai rekam jejak sejarah suatu suku bangsa dan suatu harta warisan dari suatu suku bangsa tersebut.

Perkawinan tidak lepas dengan adanya waris. Hukum waris merupakan suatu bidang yang sangat sensitif atau rawan. Hukum waris dikatakan suatu bidang yang sangat sensitif atau rawan karena waris menjadi salah satu penyebab konflik di dalam suatu perkawinan atau suatu keluarga. Hukum waris merupakan suatu bidang sensitif, hal ini disebabkan karena

¹ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 <https://sp2010.bps.go.id>, diakses 8 Juli 2019.

hukum waris (maupun hukum keluarga) erat kaitannya dengan adat-istiadat dan agama.

Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih berlaku hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu :

1. Hukum Waris Adat.
2. Hukum Waris Islam.
3. Hukum Waris Barat.

Hukum waris adat, untuk warga Indonesia asli sistem pewarisannya dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan yang terdiri dari sistem *patrilineal* (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem *matrilineal* yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau *bilateral* yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.

Berdasarkan ketiga sistem keturunan tersebut, sistem *patrilineal* adalah sistem yang dipakai di dalam masyarakat hukum adat Batak khususnya Batak Karo. Hak waris dalam hukum adat Batak Karo, berkaitan dengan struktur kekeluargaan. Struktur kekeluargaan masyarakat hukum Batak Karo berazaskan garis kebapaan (*Patrilineal*) yang ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor geneologis dan faktor teritorial. Struktur kekeluargaan masyarakat hukum Batak Karo berdasarkan garis keturunan laki-laki dan lingkungan kehidupan kekeluargaan masyarakat hukum Batak Karo yang berazaskan garis kebapaan. Masyarakat hukum adat Batak Karo ini yang disebut *kesain* (hak istimewa di adat Batak Karo) berkaitan dengan harta, yang tidak boleh

berpindah secara lepas kepada marga lain yang bukan *bangsa taneh* (klan yang menguasai tanah). Terhadap anggota persekutuan hukum *bangsa taneh* (klan yang menguasai tanah) diberikan *hak privilege* (hak istimewa) untuk menguasai harta tersebut, tetapi bukan sebagai pemilik. Oleh karena itu, harta dari persekutuan hukum tersebut tidak dapat diserahkan kepada marga lain yang bukan *bangsa taneh*.² Hal ini berpotensi menjadi sengketa waris dalam kehidupan saat ini.

Salah satu kasus sengketa waris tanah yang terdapat di Pengadilan Negeri Kabanjahe yaitu, sengketa antara penggugat dan tergugat yang berstatus saudara kandung atau anak-anak dari pada almarhum Kedah Tarigan dan almarhumah Meteh Br Gurusinga. Penggugat dan tergugat adalah Kenni Br Tarigan, Surati Br Tarigan, Nerti Br Tarigan, Perayaan Tarigan dan Lindawati Br Tarigan sebagai penggugat melawan Berandan Tarigan dan Simson Tarigan sebagai tergugat. Penggugat tidak terima dikarenakan anak-anak almarhum Kedah Tarigan dan almarhumah Meteh Br Gurusinga belum pernah menerima dan menikmati harta peninggalan almarhum orang tuanya, sehingga penggugat merasa tidak adil. Menurut hukum akan adil apabila harta peninggalan kedua orang tua dibagi dan dipisah masing-masing satu per tujuh bagian kepada setiap anak.

Pihak saudara laki-laki dari penggugat tersebut tidak pernah membagikan harta peninggalan dari kedua orang tua mereka yaitu berupa objek tanah yang diperkarakan oleh mereka. Saudara laki-laki atau tergugat

² Sarjani Tarigan, 2016, *Sekilas Sejarah Hukum Pemerintahan Karo Dan Roh Otonomi daerah Serta Pengelolaan Ekonomi Daerah*, Penerbit BABKI, Medan, hlm. 140-141.

menganggap bahwa harta warisan yang diberikan orang tua mereka hanya diberikan kepada anak laki-laki saja karena di dalam hukum waris adat Batak Karo anak perempuan tidak diberikan harta warisan. Harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Atas dasar ini, anak-anak perempuan selaku pihak penggugat menganggap tidak ada perbedaan gender terhadap hak waris tersebut, sehingga hak waris tersebut harus dibagi sama rata tanpa ada perbedaan gender seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berisi ketentuan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) di dalam pertimbangannya pada bagian a ditulis bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III bagian keempat tentang hak memperoleh keadilan. Dalam Pasal 17 berisi ketentuan, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang

obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender BAB II Pasal 2 bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan kesetaraan gender. Peraturan-peraturan tersebut merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan berjalannya waktu sesuai perkembangan zaman hukum positif Indonesia sangat kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulis adalah Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris tanah pada masyarakat hukum adat Batak Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan Nomor :29/Pdt.G/2014/PN.KBJ)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak waris tanah pada masyarakat hukum adat Batak Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Adat khususnya hukum waris adat Batak Karo.

2. Manfaat Praktis:

a. Hakim di dalam memutus perkara sengketa waris

Manfaat bagi Hakim dalam lingkungan Pengadilan Negeri yaitu sebagai pertimbangan dalam memutus perkara sengketa waris tanah.

b. Masyarakat hukum adat Batak Karo

Manfaat bagi masyarakat hukum adat Batak Karo yaitu menambah wawasan terkait perkembangan masyarakat hukum adat dan hukum waris adat khususnya dalam putusan pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Waris Tanah pada Masyarakat Hukum Adat Batak Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan Nomor :29/Pdt.G/2014/PN.KBJ), merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa penelitian yang memiliki topik yang sama, tetapi ada juga perbedaannya. Beberapa skripsi tersebut sebagai berikut;

1. Ghumam Khumaini Rohman; NIM 12340136, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Judul "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris

(Analisis Putusan Nomor 138/PDT.G/2014/PN.YYK)”. Rumusan masalahnya adalah apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian waris dengan putusan perkara nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Y.yk sudah sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata?

Hasil Penelitiannya adalah, hakim cenderung menggunakan aturan waris berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Perdata, meskipun dalam perkara tersebut ada aturan lain yaitu surat wasiat, dan seharusnya yang lebih prioritaskan adalah pembagian waris berdasarkan surat wasiat, namun hakim mengesampingkan aturan tersebut. Dalam aturan lain yang berlaku hakim melihat istri kedua merupakan golongan ahli waris pertama dan istri yang sah. Dengan alasan tersebut hakim memberikan bagian waris kepada istri kedua. Berdasarkan pernyataan tersebut, hakim dalam memutus perkara terkait dengan pembagian waris ini sudah sesuai dengan asas keadilan dan aturan hukum di Indonesia.

Persamaan penelitian penulis dengan Ghumam Khumaini Rohman yaitu meneliti pertimbangan hakim dalam pembagian hak waris, metode penelitian normatif, dan pendekatan studi kasus putusan hakim. Perbedaan penulis dengan Ghumam Khumaini Rohman yaitu tempat penelitian penulis berada di Pengadilan Negeri Kabanjahe sedangkan tempat penelitian dari Ghuman Khumaini Rohman berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memiliki perbedaan yang lain yaitu menganalisis putusan yang berbeda, nomor putusan yang dianalisis oleh penulis adalah 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ

sedangkan nomor putusan yang dianalisis Ghumam Khumaini Rohman adalah 138/Pdt.G/2014/PN.YYK.

2. Tri Harjani Lestianingsih; NIM C.100 040 209, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2010. Judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata(Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan?, apakah hambatan yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan?, bagaimana akibat dari putusan warisan di Pengadilan Negeri Surakarta?.

Hasil Penelitiannya adalah, suatu pewarisan dapat terjadi apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Seseorang dikatakan telah meninggal ketika jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan yaitu duduk perkara dari surat gugatan penggugat dan jawaban tergugat, pembuktian alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, replik dan duplik kemudian disimpulkan semua barulah diambil putusan hakim. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan yaitu bukti tidak lengkap dan saksi tidak ada. Akibat hukum putusan terhadap perkara warisan yaitu apabila seseorang hakim telah memberikan putusan pada suatu perkara maka pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut, namun apabila pihak yang kalah tidak puas dengan putusan tersebut hakim memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Tri Harjani Lestianingsih yaitu pertimbangan hakim terhadap perkara waris, metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan dengan studi kasus. Perbedaan penelitian penulis dengan Tri Harjani Lestianingsih yaitu tempat penelitian penulis berada di Pengadilan Negeri Kabanjahe sedangkan tempat penelitian Tri Harjani Lestianingsih di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Bambang Yunarko; Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2005. Judul “Analisa Putusan Sengketa Pilihan Hukum Waris”. Rumusan masalahnya adalah, bagaimana putusan sengketa pilihan hukum waris dalam yurisprudensi?

Hasil Penelitiannya adalah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1615K/Pdt/1993 tentang waris, mahkamah agung belum terlihat konsisten terhadap kaidah hukum Lex Spesialis Derogat Lex Generalis dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 karena masih memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

Persamaan penelitian penulis dengan Bambang Yunarko yaitu menganalisis putusan hakim dan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan penelitian penulis dengan Bambang Yunarto yaitu menganalisis putusan yang berbeda, yaitu nomor putusan yang dianalisis penulis adalah 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ sedangkan nomor putusan yang dianalisis oleh Bambang Yunarko adalah 1615K/Pdt/1993 dan tempat penelitian penulis

berada di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan tempat penelitian Bambang Yunarko berada di Pengadilan Negeri Surabaya.

F. Batasan Konsep

1. Dasar Pertimbangan Hakim atau *ratio decidendi* menurut Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan faktor- faktor yang sejati *material fact*, faktor-faktor yang essensiil yang justru mengakibatkan keputusan seperti putusan hakim.³
2. Waris Adat menurut Ter Haar adalah hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁴
3. Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah macam-macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.
4. Masyarakat hukum adat Batak Karo di Kabanjahe adalah masyarakat hukum adat yang tinggal dan hidup di dataran tinggi Karo dan sekitarnya. Terbentuk sebuah aturan yang menjadi dasar bagi masyarakat Karo dalam berhubungan dengan sang pencipta, alam beserta isinya dan khususnya hubungan antara masyarakat hukum adat di dalamnya.⁵

³ Miftakhul Huda, 2011, "*Ratio decidendi*" Majalah Konstitusi, tanggal 10 maret 2011, hlm 48.

⁴ TerHaar, 1982, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Prosesponoto, Jakarta, hlm. 231

⁵ Sarjani Tarigan *Op. Cit.*, hlm. 3.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal bersifat teoritis menggunakan data sekunder, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam hal ini fokusnya adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris tanah pada masyarakat hukum adat Batak Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe (studi kasus putusan Nomor :29/Pdt.G/2014/PN.KBJ)

2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutan sesuai dengan tata urutan pembentukan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28D ayat (1) tentang Kesamaan Hak di Depan Hukum.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 1 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab III Pasal 17 tentang Hak Memperoleh Keadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari, dokumen dan narasumber yaitu:

- 1) Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari dokumen yang berupa putusan pengadilan yakni, Yurisprudensi Reg.No. 179 K/Sip./1961 dan Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Kbj.
- 2) Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Delima Mariago Simanjuntak,S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Joni Damanik, S.H. selaku panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Drs. Yoe Anto Ginting, MA. selaku ahli hukum adat/dosen Universitas Sumatra Utara Fakultas Ilmu Budaya.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum sekunder mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah waris di Pengadilan Negeri Kabanjahe, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, dokumen dan narasumber.

- b. Wawancara dengan hakim atau panitera yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah waris di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

4. Analisis

Analisis dilakukan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas hukum normatif, yaitu:

1) Deskripsi

Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam bahan hukum primer perihal mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah waris di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

2) Sistematisasi

Sistematisasi secara *vertikal* adalah sinkronisasi dari aturan hukum yang lebih tinggi terhadap aturan hukum yang lebih rendah dalam suatu hirarki peraturan perundangan.

3) Analisis

Analisis hukum positif sebagai *open system*, artinya peraturan perundang-undangan perihal mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah waris di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

4) Interpretasi

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal, sistematisasi dan teologis yang mempunyai arti:

a) Gramatikal

Gramatikal yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata yang terdapat pada undang-undang

b) Sistematisasi

Sistematisasi yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan undang-undang atau dengan keseluruhan sistem hukum.

c) Teologis

Teologis yaitu cara penafsiran ketentuan undang-undang untuk mengetahui makna yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.

5) Menilai Hukum Positif

Penilaian penulis berdasarkan pada kesesuaian antara putusan pengadilan terhadap nilai-nilai masyarakat hukum adat Batak Karo.

- b. Bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari dokumen berupa Yurisprudensi Reg.No. 179 K/Sip./1961 dan Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2014/PN.Kbj tentang perkara waris tanah di Pengadilan Negeri kabanjahe. Tahapan terakhir yaitu melakukan perbandingan antara hukum primer dan hukum sekunder sehingga mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris tanah pada masyarakat hukum adat Batak Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

5. Proses Berpikir/ Prosedur Bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, yang bertolak dari hal-hal umum berupa hukum positif untuk menentukan kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris tanah pada masyarakat hukum adat Batak Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan Nomor:29/Pdt.G/2014/PN.KBJ).

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: Pembahasan berisi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hukum waris adat Batak Karo dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris tanah.

BAB III: Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.